

BAB III

AWAL TERJADINYA KONFLIK PRRI/PERMESTA

3.1 Latar Belakang Terbentuknya PRRI

3.1.1 Bidang Politik

Sistem kepartaian yang menjadi inti dari mekanisme pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 mencerminkan harapan akan terwujudnya pemerintahan demokratis berbasis representasi rakyat. Namun dalam praktiknya, sistem ini justru memunculkan tantangan besar bagi stabilitas dan integritas nasional. Munculnya banyak partai politik pasca kemerdekaan, yang dipicu oleh kebebasan berekspresi dan berorganisasi, ternyata tidak mampu meredam polarisasi politik, bahkan sebaliknya, memperuncing perbedaan pandangan serta kepentingan politik antar golongan dan wilayah¹⁰⁰.

Polarisasi ini sudah tampak sejak awal tahun 1950-an, namun menjadi sangat nyata dalam pemilu pertama tahun 1955, yang menjadi tolok ukur demokrasi Indonesia saat itu. Hasil pemilu menunjukkan bahwa partai-partai besar seperti PNI (Partai Nasional Indonesia) dan NU (Nahdlatul Ulama) mendapatkan suara mayoritas di pulau Jawa, sedangkan partai-partai berbasis agama lain seperti Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, dan PSI memperoleh dukungan lebih kuat dari luar Jawa¹⁰¹. Ini menunjukkan terjadinya segmentasi politik yang tidak hanya berdasarkan ideologi, tetapi juga berdimensi geografis dan kultural. Polarisasi

¹⁰⁰ Leirissa. *op. cit.* hlm. 7-8

¹⁰¹ *ibid. loc. cit.* hlm. 8

semacam ini memperlihatkan betapa rentannya persatuan nasional jika tidak disertai dengan integrasi politik yang kuat.

Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya praktik sentralisme politik dan administrasi, terutama pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (1955–1957). Pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan dropping atau penempatan pejabat-pejabat pusat, yang umumnya berasal dari pulau Jawa, ke berbagai daerah di luar Jawa. Hal ini menimbulkan kecemburuan politik dan sosial di daerah-daerah, terutama di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, yang merasa tidak diberi ruang cukup untuk mengelola urusan mereka sendiri. Tokoh militer seperti Jenderal Nasution menyoroti fenomena ini, mengkritisi penempatan pejabat-pejabat seperti gubernur, residen, kepala kepolisian, dan jaksa yang semuanya berasal dari Jawa, sehingga perwakilan lokal hanya tersisa di ranah militer¹⁰².

Dalam situasi seperti ini, birokrasi pemerintahan menjadi tidak efektif dan kehilangan arah, karena loyalitas para pejabat lebih besar kepada partainya dibandingkan kepada institusi negara. Tidak adanya sistem kontrol yang memadai serta lemahnya norma-norma birokrasi menyebabkan maraknya korupsi di berbagai lapisan pemerintahan. Korupsi ini tidak hanya menjadi praktik individual, tetapi telah menjelma menjadi bagian dari sistem birokrasi yang cacat. Situasi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka secara formal dan berhasil melaksanakan pemilu demokratis, fundasi politik dan birokrasi negara

¹⁰² A. H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas* (Jakarta: Gunung Agung, 1984). hlm. 4-8

belum cukup kuat untuk menopang sistem pemerintahan yang stabil dan adil. Polarisasi, sentralisme, dan korupsi menjadi cermin dari krisis legitimasi dan disfungsi pemerintahan.

Praktik-praktik sentralisme yang terlalu kuat dari pemerintah pusat, seperti penempatan pejabat dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa dan dominasi partai-partai tertentu dalam kebijakan nasional, menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan di daerah. Salah satu bentuk reaksi tersebut adalah munculnya tuntutan otonomi yang disertai dengan semboyan-semboyan perlawanan yang mencerminkan keinginan untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan daerah sendiri.

Dalam kerangka otonomi yang diperjuangkan, daerah menuntut hak penuh untuk mengatur berbagai aspek yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya, pengangkatan dan penempatan guru-guru dianggap lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka lebih memahami kebutuhan pendidikan setempat. Demikian pula dalam pembinaan kesenian dan kebudayaan lokal, daerah merasa lebih mampu mengembangkan kekayaan budaya mereka dibandingkan jika harus menunggu intervensi dari pemerintah pusat yang seringkali lambat dan tidak memahami kondisi lokal. Sementara itu, urusan-urusan yang dianggap sebagai kepentingan nasional seperti pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, dan strategi pembangunan nasional seperti industrialisasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat¹⁰³.

¹⁰³ *ibid.* hlm. 14

Selain itu, otonomi juga dipandang sebagai cara untuk mengatasi kelambanan birokrasi pusat yang terlalu birokratis dan tidak responsif. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program-program pembangunan secara mandiri, proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, tuntutan otonomi mencerminkan keinginan daerah untuk diakui sebagai bagian yang setara dan berperan aktif dalam pembangunan nasional, bukan sekadar pelaksana kebijakan dari pusat

3.1.2 Bidang Ekonomi

Pada dekade 1950-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang ekonomi, terutama terkait dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Situasi ini mencerminkan kondisi pasca-kemerdekaan yang masih diwarnai oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem birokrasi yang belum stabil. Ketidakseimbangan pembangunan ini berdampak langsung terhadap perekonomian nasional, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi terpusat dan tidak merata¹⁰⁴.

Pulau Jawa, khususnya Jakarta sebagai ibu kota negara, menjadi pusat perhatian utama dalam pembangunan. Pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pembangunan infrastruktur, perkantoran, pendidikan, dan fasilitas publik di wilayah ini. Sementara itu, daerah-daerah di luar Jawa, yang sebenarnya menyimpan potensi sumber daya alam yang besar seperti

¹⁰⁴ Syamdani, *PRRI Pemberontakan Atau Bukan* (Yogyakarta: Medpress, 2008). hlm. 39-40

tambang, hasil hutan, dan pertanian, justru mengalami stagnasi pembangunan¹⁰⁵. Minimnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan pendidikan memperparah kesenjangan antara pusat dan daerah.

Catatan dari S. Takdir Alisjahbana pada tahun 1956 memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai ketimpangan kontribusi ekonomi antar daerah di Indonesia pada masa itu, terutama dalam konteks ekspor dan devisa negara. Dari data tersebut, terlihat bahwa pulau Sumatera merupakan penyumbang terbesar ekspor nasional Indonesia dengan kontribusi mencapai sekitar 71% dari total ekspor negara. Rinciannya pun mencerminkan dominasi Sumatera Selatan dengan 35%, diikuti oleh Sumatera Utara 21%, dan Sumatera Tengah 15%. Sebaliknya, Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara, hanya menyumbang 17% dari total ekspor, sementara kepulauan lain menyumbang sekitar 12%. Ketimpangan ini semakin mencolok ketika dilihat dari segi kontribusi per kapita. Tiap penduduk Sumatera Selatan, misalnya, menyumbang devisa rata-rata sebesar Rp. 1000,- per tahun, sementara warga Sumatera Tengah Rp. 373,-, dan Sumatera Utara Rp. 339,-. Bandingkan dengan Pulau Jawa dan Madura yang hanya menghasilkan rata-rata Rp. 27,50,- per orang, dan kepulauan lain sebesar Rp. 67,50,-¹⁰⁶.

Dari fakta ini, terlihat bahwa sumber kekayaan negara pada saat itu mayoritas berasal dari luar Jawa, khususnya dari Sumatera. Namun ironisnya, pembangunan

¹⁰⁵ Aryasahab. *op. cit.* hlm. 41

¹⁰⁶ S. Takdir Alisjahbana, *Perjuangan Untuk Autonomi Dan Kedudukan Adat Di Dalanja* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1957). hlm. 16-17

dan investasi pemerintah lebih banyak dipusatkan di Jawa, khususnya Jakarta. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan, tetapi juga mencerminkan kebijakan sentralistik yang mengabaikan kontribusi nyata dari daerah-daerah penghasil.

Peristiwa ketimpangan pembangunan dan kontribusi ekonomi yang tidak sebanding dengan perhatian dari pemerintah pusat menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan rakyat Sumatera Barat. Rasa ketidakadilan ini tumbuh seiring dengan kesadaran masyarakat bahwa perlakuan pemerintah pusat, yang berpusat di Jakarta, tidak memberikan perhatian yang sepadan terhadap pulau-pulau di luar Jawa, terutama Sumatera yang secara nyata menjadi tulang punggung ekspor nasional saat itu.

Kekecewaan ini bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga berwujud dalam bentuk pemikiran dan sikap kritis masyarakat Sumatera terhadap sistem pemerintahan yang berlaku. Mereka mulai mempertanyakan mengapa hasil kekayaan alam dan kerja keras daerah mereka tidak dibarengi dengan pembangunan yang memadai. Dalam konteks ini, timbul desakan kuat agar sistem pemerintahan yang sentralistik diganti dengan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Harapan mereka adalah agar otonomi daerah dapat menjadi jalan untuk memperjuangkan keadilan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di luar pulau Jawa, khususnya Sumatera Barat.

3.1.3 Bidang Militer

Faktor militer memainkan peran penting dalam latar belakang terbentuknya gerakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Kebijakan politik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) memberikan dampak yang luas, bukan hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga terhadap struktur militer di Indonesia. Sistem politik parlementer yang diadopsi pada masa itu, dengan segala tarik-menarik kepentingan antar partai, menciptakan ketidakstabilan yang turut memengaruhi tubuh militer.

Salah satu kebijakan yang menimbulkan gejolak adalah pengerucutan atau rasionalisasi dalam tubuh TNI, yakni pengurangan jumlah pasukan dengan dalih efisiensi. Kebijakan ini mengakibatkan banyak perwira, terutama mereka yang sebelumnya aktif berjuang dalam revolusi kemerdekaan, harus dinonaktifkan atau dipinggirkan. Kondisi ini melukai harga diri banyak prajurit yang merasa jasa mereka diabaikan setelah pengorbanan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia¹⁰⁷.

Dalam situasi tersebut, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah pusat berkembang menjadi krisis kepercayaan. Ketika saluran politik formal dianggap tidak lagi efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah, maka peran dan prakarsa mulai diambil alih oleh kelompok militer di daerah. Eksponen-eksponen militer yang sebelumnya berjuang dalam

¹⁰⁷ Aryasahab. *loc. cit.*

mempertahankan kemerdekaan, kini merasa memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai representasi kepentingan rakyat di daerah masing-masing.

Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai dewan militer di wilayah Sumatera pada tahun 1956 dan 1957. Di Sumatera Barat, muncul Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, di Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, dan di Sumatera Selatan terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian¹⁰⁸. Masing-masing dewan ini menyuarkan kritik terhadap pemerintah pusat, menuntut otonomi yang lebih besar, dan memprotes ketimpangan pembangunan serta kebijakan yang dirasa tidak adil.

Pertemuan di Sungai Dareh pada tanggal 9 dan 10 Desember 1957 menjadi tonggak penting dalam sejarah pergolakan daerah di Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan wadah koordinatif baru yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan berbagai daerah yang tengah bergolak, terutama di Sumatera dan beberapa wilayah lainnya. Wadah tersebut diberi nama Dewan Perjuangan. Kepemimpinan Dewan Perjuangan dipegang oleh Letkol Ahmad Husein dari Dewan Banteng, yang menjadi tokoh sentral dalam pergolakan tersebut. Selain Ahmad Husein, struktur Dewan Perjuangan juga mencakup wakil-wakil dari dewan militer daerah lain seperti Dewan Gajah dan Dewan Garuda, serta Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). hlm. 199

¹⁰⁹ *ibid.* hlm. 201

Pada tanggal 11 Februari 1958, situasi politik Indonesia memasuki fase krusial ketika pemerintah pusat, yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Djuanda, menggelar sidang kabinet guna merespons tekanan politik dari daerah. Sidang ini diadakan sebagai tanggapan atas ultimatum yang dilayangkan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Dewan Pejuang di Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Ultimatum tersebut menuntut agar pemerintah pusat melakukan perubahan signifikan terhadap arah kebijakan nasional¹¹⁰.

Dalam sidang yang dihadiri oleh para pimpinan tertinggi militer — seperti KSAU Suryadarma, KSAD Jenderal A.H. Nasution, KSAL Subiyakto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Kolonel Hidayat, diputuskan secara tegas bahwa pemerintah pusat menolak ultimatum dari Dewan Pejuang¹¹¹. Keputusan ini memperlihatkan sikap keras pemerintah untuk tidak tunduk terhadap tekanan bersenjata dari daerah, yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap struktur negara kesatuan. Pada saat yang hampir bersamaan, militer pusat mengeluarkan surat pemecatan terhadap sejumlah perwira tinggi yang dianggap terlibat atau mendukung gerakan pembangkangan tersebut. Nama-nama yang dicopot dari jabatannya antara lain Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein, dan Kolonel Maludin Simbolon¹¹².

¹¹⁰ Aryasahab. *loc. cit.*

¹¹¹ Idris Soewardi, *Perjalanan Dalam Kelam, Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI* (Yogyakarta: Baranda Publishing, 2008). hlm. 17

¹¹² Aryasahab. *loc. cit.*

Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 1958, diproklamlirkanlah pemerintahan tandingan bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Proklamasi tersebut dilakukan pada pukul 22.00 WIB, dengan menetapkan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri PRRI¹¹³. Pembentukan PRRI menandai dimulainya babak baru dalam sejarah pergolakan daerah di Indonesia, yang tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasan atas pembangunan yang timpang dan dominasi Jawa, tetapi juga oleh ketegangan antara unsur militer daerah dan pemerintah pusat.

Pembentukan PRRI tidak bisa dilepaskan dari gabungan kekecewaan politik, ketimpangan pembangunan, dan perlakuan terhadap militer yang dianggap tidak proporsional. Semua faktor ini berpadu menjadi momentum yang mendorong sejumlah tokoh militer dan sipil daerah untuk mengambil sikap ekstrem sebagai bentuk penegasan terhadap ketidakpuasan mereka terhadap jalannya pemerintahan.

3.2 Latar Belakang Terbentuknya Permesta

3.2.1 Terbentuknya Permesta

Secara umum, latar belakang terbentuknya Permesta (Perjuangan Semesta) memang memiliki kemiripan yang cukup signifikan dengan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), baik dari segi ekonomi maupun politik. Kedua gerakan ini merupakan respons terhadap kekecewaan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralistik, tidak adil dalam distribusi

¹¹³ Audrey R. Kahin and George McTurnan Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri : Meyungkap Keterlibatan CIA Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). hlm. 203

sumber daya, serta gagal menciptakan pemerintahan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Dari segi ekonomi, baik PRRI di Sumatera maupun Permesta di Indonesia Timur sama-sama dipicu oleh ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Daerah-daerah penghasil komoditas ekspor utama seperti Sumatera dan Sulawesi merasa bahwa kontribusi ekonominya tidak diimbangi dengan alokasi anggaran dan pembangunan yang setara. Pemerintah pusat dianggap menyerap sebagian besar pendapatan dari daerah, khususnya dari komoditas lokal, namun tidak mengembalikannya dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Sementara itu, dari sisi politik, pembentukan PRRI dan PERMESTA dilatari oleh situasi nasional yang tidak stabil pasca pemilu 1955, konflik antarpolitik, dan kekecewaan terhadap praktik birokrasi pusat yang dinilai korup serta tidak responsif terhadap aspirasi daerah. Sentralisasi kekuasaan yang diberlakukan melalui sistem parlementer dalam UUDS 1950 sering kali mempersempit ruang gerak daerah dalam menentukan nasibnya sendiri. Keputusan-keputusan penting seperti penempatan pejabat daerah sering diambil tanpa melibatkan suara lokal.

Pada bulan Februari 1957, Gubernur Sulawesi saat itu, Andi Pangerang Pettarani, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta guna menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang tengah melanda wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi. Dalam pertemuan tersebut, ia mengemukakan situasi genting yang terjadi di daerahnya sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan nasional yang terlalu terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah daerah Sulawesi, menurut Andi

Pangerang, telah lama merasakan marginalisasi dalam hal pengambilan keputusan politik maupun alokasi anggaran pembangunan, sehingga merasa perlu menuntut perhatian dan respons yang lebih adil dari pemerintah pusat¹¹⁴.

Dalam dialog itu, Andi Pangerang mendesak agar pemerintah pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUDS 1950, yang sebenarnya telah menggariskan prinsip desentralisasi sebagai kerangka utama penyelenggaraan pemerintahan. Ia meyakini bahwa melalui otonomi yang nyata dan substansial, daerah-daerah seperti Sulawesi dapat menyelenggarakan pembangunan secara lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi sumber dayanya sendiri.

Selain menuntut pelimpahan kewenangan, Andi Pangerang juga mengajukan permintaan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 350 juta kepada pemerintah pusat. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi modal awal untuk memulai program-program pembangunan yang mendesak di Sulawesi pada tahun anggaran 1957. Tuntutan ini mencerminkan adanya kesenjangan pembangunan yang signifikan antara pusat dan daerah, di mana Indonesia Timur, termasuk Sulawesi, belum merasakan hasil nyata dari pembangunan nasional pasca-kemerdekaan. Andi Pangerang juga mengusulkan adanya perubahan sistem pembagian pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, khususnya yang berasal dari komoditas utama daerah seperti kopra. Ia mengusulkan skema pembagian hasil sebesar 70 persen untuk daerah dan 30 persen untuk pusat, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi

¹¹⁴ Barbara Silirs Harvey, *Pemesta Pemberontakan Setengah Hati* (Jakarta: Grafiti Press, 1989). hlm. 42

ekonomi Sulawesi terhadap pendapatan nasional¹¹⁵. Skema ini dinilai lebih adil karena memungkinkan daerah memperoleh sumber pembiayaan sendiri yang lebih memadai dan berkelanjutan.

Sementara itu, pihak militer dari Makassar juga mengambil langkah strategis dengan menekan pimpinan TNI Angkatan Darat (TNI-AD) untuk mendukung agenda desentralisasi yang tengah diperjuangkan oleh elit-elit daerah. Tuntutan utama mereka mencakup pemberian otonomi daerah yang lebih luas, terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan pelaksanaan pembangunan yang lebih merata. Mereka menekankan pentingnya alokasi pendapatan negara yang lebih besar bagi daerah, dengan harapan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara langsung untuk mendanai proyek-proyek pembangunan lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Para perwira militer juga mengusulkan reformasi struktural dalam tubuh militer sendiri. Secara khusus, mereka mendesak agar Komando Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (Ko-DPSST), yang kala itu masih berada di bawah kendali langsung Markas Besar TNI-AD di Jakarta, segera diganti dengan Komando Daerah Militer (KDM) yang lebih mandiri. Dengan perubahan ini, struktur militer di daerah diharapkan memiliki kewenangan yang lebih besar dan tidak lagi sepenuhnya tergantung pada pusat, serta lebih mampu merespons dinamika dan kebutuhan keamanan di tingkat regional secara efektif¹¹⁶.

¹¹⁵ Andi Mattalatta, *Meniti Siri Dan Harga Diri* (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2003). hlm. 623

¹¹⁶ Harvey. *op. cit.* hlm. 44

Menjelang akhir Februari 1957, situasi politik di Indonesia Timur semakin memanas seiring dengan kegagalan berbagai upaya negosiasi yang dilakukan oleh elite daerah dengan pemerintah pusat. Sebagai langkah terakhir, dua tokoh penting dari pemerintah Provinsi Sulawesi, yakni Andi Burhanuddin dan Henk Rondonuwu, diberangkatkan ke Jakarta sebagai delegasi resmi untuk menyuarakan kembali aspirasi daerah terkait desentralisasi pemerintahan dan pembagian pendapatan yang lebih adil. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya yang telah dilakukan oleh Gubernur Andi Pangerang Pettarani dan para tokoh militer Sulawesi¹¹⁷.

Seiring dengan keberangkatan delegasi sipil tersebut, Letkol Ventje Sumual selaku Panglima Tentara dan Territorium VII (TT-VII) juga melakukan perjalanan ke Jakarta. Selain untuk menyuarakan tuntutan yang serupa, ia memanfaatkan kunjungannya untuk membangun komunikasi dan jaringan dengan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dianggap memiliki simpati terhadap perjuangan daerah. Namun, semua upaya diplomatik ini kembali menemui jalan buntu. Pemerintah pusat tetap tidak memberikan respons konkret terhadap berbagai tuntutan yang diajukan.

Kekecewaan atas sikap pasif pemerintah pusat akhirnya mendorong para pemimpin daerah untuk mengambil langkah tegas. Pada tanggal 25 Februari 1957, sebelum delegasi kembali ke Makassar, telah dilangsungkan rapat rahasia antara unsur pimpinan sipil dan militer di Sulawesi yang membahas rencana proklamasi

¹¹⁷ *ibid.* hlm. 45

gerakan Permesta¹¹⁸. Rapat ini menandai titik balik dari strategi negosiasi menuju aksi politik yang lebih radikal, yaitu mendirikan gerakan alternatif sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktur kekuasaan negara.

Pada tanggal 2 Maret 1957, sebuah peristiwa penting terjadi di Makassar yang menandai dimulainya gerakan perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat. Sekitar lima puluh tokoh, terdiri dari kalangan militer dan sipil terkemuka di Sulawesi, berkumpul dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan pada dini hari, tepatnya pukul tiga subuh. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Tentara Teritorium VII (TT-VII) Wirabuana, Herman Nicolas Ventje Sumual¹¹⁹. Ventje Sumual membuka secara resmi sidang tersebut dan membacakan sebuah deklarasi penting, yakni proklamasi keadaan darurat perang untuk wilayah Indonesia Timur¹²⁰. Tindakan ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dianggap gagal mewujudkan pemerintahan yang adil dan merata bagi seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam konteks pembangunan dan pembagian sumber daya.

Setelah pembacaan proklamasi, Letkol Saleh Lahade menyusul dengan membacakan dokumen yang menjadi dasar ideologis gerakan tersebut, yakni Piagam Perjuangan Semesta. Pemilihan istilah semesta dalam piagam ini bukan tanpa alasan, istilah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perjuangan

¹¹⁸ *ibid.* hlm. 47

¹¹⁹ Anhar Gonggong, 'Sejarah Pemberontakan Bersenjata Di Indonesia: Sketsa Pergumulan Di Dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-2006', *Jurnal Hukum Humaniter*, 2.3 (2006), 471–72. Hlm. 467-468

¹²⁰ Ricklefs. *op. cit.* hlm. 531

yang dicanangkan tidak hanya bersifat sektoral atau terbatas secara geografis, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlaku di seluruh wilayah negara¹²¹. Dengan demikian, gerakan ini ingin memperlihatkan bahwa tuntutan mereka mencerminkan aspirasi luas, bukan sekadar kepentingan lokal semata.

Keesokan harinya setelah proklamasi Permesta pada 2 Maret 1957, struktur pemerintahan militer secara resmi diumumkan sebagai langkah konkret dalam pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah di Indonesia Timur. Dalam susunan pemerintahan baru ini, Ventje Sumual ditetapkan sebagai Administrator Militer tertinggi, menandai posisi sentralnya dalam kepemimpinan gerakan Permesta. Posisi Kepala Staf dipercayakan kepada Letkol Saleh Lahade, mempertegas peran pentingnya dalam koordinasi strategis dan operasional gerakan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan representatif, dibentuk pula sebuah Dewan Pertimbangan Pusat yang terdiri dari 101 anggota. Dewan ini dirancang untuk memberikan masukan, pertimbangan kebijakan, dan dukungan moral-politik terhadap administrasi militer yang sedang dibentuk.

Lebih lanjut, dalam struktur tersebut, di bawah kepemimpinan Sumual ditunjuk empat gubernur militer yang akan mengelola wilayah-wilayah strategis di kawasan timur Indonesia. Keempat gubernur militer ini adalah Andi Pangerang untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, Mayor Daniel Julius Somba untuk

¹²¹ Harvey. *loc. cit.*

Sulawesi Utara dan Tengah, Letkol Herman Pieters untuk wilayah Maluku dan Irian Barat, serta Letkol Minggu untuk wilayah Nusa Tenggara¹²².

Dalam hal ini, masing-masing gubernur militer sebelumnya merupakan perwira aktif dengan jabatan strategis di kesatuan resimen infanteri yang ada di wilayah mereka. Somba menjabat sebagai Komandan Resimen Infanteri 24 (RI-24) yang bermarkas di Manado, Pieters memimpin Resimen Infanteri 25 (RI-25) yang berkedudukan di Ambon, dan Letkol Minggu mengepalai Resimen Infanteri 26 (RI-26) yang bermarkas di Bali. Sedangkan Andi Pangerang sebelumnya adalah Gubernur Sulawesi yang sudah sejak lama mengadvokasi desentralisasi dan pembangunan regional.

Proses pelantikan para pejabat militer ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Andi Pangerang secara resmi dilantik pada tanggal 8 Maret 1957, sementara pelantikan D. J. Somba berlangsung di Manado pada tanggal 11 Maret¹²³. Pembentukan dan pelantikan pemerintahan militer ini mencerminkan upaya sistematis dalam mendirikan struktur pemerintahan alternatif yang dianggap lebih mewakili aspirasi daerah-daerah di Indonesia Timur, sekaligus menjadi simbol ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan pusat yang dianggap terlalu sentralistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan pembangunan di luar Pulau Jawa.

¹²² *ibid.* hlm. 49

¹²³ *ibid.*

3.2.2 Hubungan Permesta dengan PRRI

Pada bulan September 1957, Ventje Sumual melakukan perjalanan ke Palembang untuk bertemu dengan Letkol Ahmad Husein dan Letkol Barlian. Pertemuan tersebut mempertemukan tiga tokoh militer yang mewakili kepentingan daerah-daerah di luar Jawa, yang memiliki pandangan serta aspirasi serupa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ahmad Husein adalah tokoh sentral dalam Dewan Banteng di Sumatera Barat, sementara Barlian merupakan inisiator dari Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Keduanya, seperti halnya Sumual dengan gerakan Permesta di Indonesia Timur, menyuarakan tuntutan otonomi daerah yang lebih luas dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan negara secara keseluruhan.

Pertemuan tiga perwira ini menghasilkan dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Persetujuan Palembang. Dalam piagam tersebut, mereka bersama-sama merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Di antara tuntutan utama adalah pemulihan Dwitunggal yaitu kemitraan politik antara Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang telah terganggu, penggantian pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah awal menuju stabilisasi internal di tubuh TNI, pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang nyata, termasuk pemberian otonomi luas kepada daerah, serta pelarangan terhadap paham komunisme yang pada saat itu dianggap sebagai ancaman ideologis dan politik terhadap keutuhan bangsa¹²⁴.

¹²⁴ al

anana Pada tanggal 15 Februari 1958, Dewan Perjuangan yang bermarkas di Padang secara resmi memproklamasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pengumuman ini menandai puncak dari akumulasi ketegangan antara daerah-daerah di luar Jawa dengan pemerintah pusat yang dianggap gagal mengakomodasi aspirasi politik, ekonomi, dan militer mereka.

Setelah proklamasi tersebut, PRRI membentuk struktur pemerintahan sendiri, lengkap dengan susunan kabinet yang terdiri dari berbagai tokoh politik dan militer dari berbagai wilayah. Syafruddin Prawiranegara, seorang tokoh penting dalam sejarah pemerintahan darurat sebelumnya, diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI. Kolonel Maludin Simbolon dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sementara ekonom nasional terkemuka Sumitro Djojohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Dari pihak Permesta, Warouw ditunjuk sebagai Menteri Pembangunan, Saleh Lahade menjabat sebagai Menteri Penerangan, dan Mochtar Lintang dipercaya mengelola urusan keagamaan sebagai Menteri Agama. Sementara itu, Ventje Sumual, tokoh utama dari gerakan Permesta, diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat PRRI¹²⁵, sebuah posisi penting yang memperkuat keterlibatan militer dalam pemerintahan revolusioner tersebut.

Dua hari setelah proklamasi PRRI pada 15 Februari 1958, gerakan Permesta yang berpusat di Sulawesi secara resmi menyatakan bergabung dengan PRRI¹²⁶. Keputusan ini menandai penguatan hubungan antara dua gerakan pemberontakan daerah yang sebelumnya memiliki latar belakang dan basis geografis berbeda,

¹²⁵ Harvey. *op. cit.* hlm. 84

¹²⁶ Ricklefs. *op. cit.* hlm. 544

namun memiliki aspirasi politik yang serupa, yaitu menuntut otonomi yang lebih luas, distribusi keuangan yang adil, dan reformasi struktural dalam tubuh pemerintahan pusat.

3.3 Keterlibatan Pihak Asing

Sepanjang tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat semakin mencemaskan kondisi politik Indonesia yang dinilai rentan jatuh ke dalam pengaruh komunisme, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan popularitas Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai negara yang sangat anti-komunis, Amerika Serikat menaruh perhatian besar terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kekuatan PKI yang pada pertengahan 1950-an menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar blok Soviet dan Tiongkok. Kekhawatiran Amerika Serikat muncul karena Indonesia dianggap sebagai negara strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, dalam upaya menahan penyebaran ideologi komunis di kawasan Asia Tenggara¹²⁷.

Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, pada awal tahun 1958, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (*Central Intelligence Agency* atau CIA) mulai membangun dan mengembangkan jaringan operasi rahasia untuk memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan pemberontakan daerah seperti PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Bantuan tersebut mencakup logistik hingga penyediaan persenjataan. Hal ini diakui secara langsung oleh salah satu tokoh Permesta, Lengkon Worang. Dalam kesaksiannya, Worang menyebutkan bahwa

¹²⁷ Syamdani. *op. cit.* hlm. 10-11

ketika konflik bersenjata Permesta meletus, pasukan mereka telah diperlengkapi dengan ribuan pucuk senjata api, senapan mesin lengkap dengan amunisi, serta sejumlah mortir kaliber 81 mm. Selain persenjataan ringan dan berat, mereka juga memperoleh kendaraan militer seperti truk pengangkut dan mobil jip¹²⁸.

Meskipun dukungan asing, khususnya dari Amerika Serikat, sempat memberikan angin segar bagi gerakan Permesta, kenyataannya kekuatan tersebut hanya bersifat sementara. Bantuan dalam bentuk senjata, logistik, hingga keterlibatan langsung personel asing seperti pilot-pilot tempur dari Amerika Serikat, secara tiba-tiba dihentikan hanya beberapa bulan setelah konflik memanas. Pada bulan Mei 1958, seluruh bantuan militer tersebut ditarik kembali, dan hubungan operasional antara pihak Permesta dan pihak luar terputus. Keputusan ini tentu saja menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di kalangan pimpinan dan pasukan Permesta, karena mereka merasa ditinggalkan pada saat dukungan tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi ofensif militer dari pemerintah pusat.

Setelah penarikan bantuan tersebut, pasukan PRRI/Permesta, baik di Sumatra Barat maupun di Minahasa, harus menghadapi serangan dari Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) secara mandiri tanpa sokongan asing¹²⁹. Situasi ini menandai perubahan besar dalam dinamika perlawanan mereka, yang awalnya cukup diuntungkan oleh kekuatan udara dan suplai senjata luar negeri.

¹²⁸ Faishal Hilmy Maulida, 'Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961', *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8.2 (2018), 174. hlm. 179

¹²⁹ Leirissa. *op. cit.* hlm. 194-195

Perubahan sikap Amerika Serikat terhadap konflik internal di Indonesia erat kaitannya dengan pergeseran strategi diplomatik dan penilaian ulang terhadap situasi politik di Jakarta. Pada bulan Maret 1958, AS mengganti duta besarnya untuk Indonesia dengan Howard P. Jones. Setibanya di Indonesia, Jones segera menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh penting nasional seperti Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Perdana Menteri Djuanda, dan Jenderal A.H. Nasution. Dari pertemuan-pertemuan ini, Jones menyimpulkan bahwa di lingkungan pemerintahan pusat masih terdapat sosok-sosok yang cukup kuat dan berpengaruh serta memiliki komitmen antikomunis yang bisa diandalkan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ia merekomendasikan kepada pemerintah Amerika agar alih-alih terus mendukung pemberontakan daerah, lebih baik mereka memperkuat posisi pemerintahan pusat melalui bantuan ekonomi dan militer langsung ke Jakarta¹³⁰.

Pada tahap awal, Amerika Serikat masih menunjukkan keraguan dan memberikan syarat bahwa penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan melalui jalur politik, yakni dengan mendorong terjadinya perundingan antara pemerintah pusat dan PRRI/Permesta. Namun, situasi berubah drastis setelah insiden penembakan terhadap pesawat Allan Laurence Pope, seorang pilot Amerika Serikat, pada 18 Mei 1958¹³¹.

Allan Pope ditahan atas tuduhan melakukan tindakan subversif terhadap negara, dan penangkapan ini menimbulkan kehebohan di dalam maupun luar

¹³⁰ Maulida. *loc. cit.*

¹³¹ Syamdani. *loc. cit.* hlm. 11

negeri, terutama karena Pope diketahui memiliki keterkaitan langsung dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA). Fakta bahwa Pope adalah pilot asing yang terlibat dalam misi tempur di Indonesia memperkuat dugaan bahwa ada campur tangan kekuatan asing, khususnya Amerika, dalam konflik domestik Indonesia. Situasi ini membuat posisi Amerika Serikat menjadi sangat rentan secara diplomatik. Tidak hanya memperburuk citra AS di mata dunia, penangkapan Pope juga menegaskan secara nyata bahwa Amerika telah melanggar prinsip non-intervensi terhadap kedaulatan negara lain. Dalam menghadapi tekanan politik dan risiko eskalasi ketegangan dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika akhirnya mengikuti saran dari Duta Besar Howard P. Jones untuk mengubah pendekatan mereka terhadap konflik Indonesia¹³².

Sebagai langkah penyesuaian kebijakan, pada tanggal 22 Mei 1958, Amerika Serikat menyetujui pemberian bantuan senjata dan ekonomi secara resmi kepada pemerintah pusat Indonesia. Langkah ini menandai pergeseran strategi dari mendukung kelompok pemberontak daerah menjadi memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk menindaklanjuti perubahan arah kebijakan tersebut, pada 13 Agustus 1958, sebuah perjanjian ekonomi baru ditandatangani antara Indonesia dan Amerika Serikat¹³³.

Dengan demikian, keterlibatan Amerika Serikat dalam mendukung PRRI/Permesta memperlihatkan bagaimana konflik domestik di Indonesia pada masa itu tidak hanya didorong oleh faktor internal seperti ketimpangan ekonomi

¹³² Maulida. *loc. cit.*

¹³³ Leirissa. *loc. cit.* hlm. 195

dan ketidakpuasan daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik global dalam Perang Dingin.

Latar belakang pembentukan PRRI/Permesta dapat dijelaskan secara teoritis melalui konsep deprivasi-relatif yang dikemukakan oleh Ted Robert Gurr. Dalam teorinya, Gurr menjelaskan bahwa deprivasi relatif terjadi ketika terdapat kesenjangan antara harapan atau aspirasi suatu kelompok dengan realitas yang mereka alami. Ketika kelompok tersebut merasa bahwa kondisi aktual mereka jauh dari apa yang mereka anggap layak atau pantas mereka dapatkan, maka akan timbul perasaan frustrasi yang dapat berkembang menjadi tindakan agresif atau pemberontakan¹³⁴.

Dalam konteks pembentukan PRRI dan Permesta, deprivasi-relatif tercermin jelas dalam ketimpangan pembangunan antara daerah di luar Jawa, terutama Sumatera dan Sulawesi dengan Pulau Jawa, khususnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Masyarakat dan elite daerah merasa bahwa kontribusi besar mereka terhadap ekonomi nasional, seperti melalui ekspor hasil bumi dari Sumatera, tidak sebanding dengan perhatian dan alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar devisa negara berasal dari luar Jawa, tetapi daerah-daerah tersebut justru mendapat bagian kecil dari hasil pembangunan nasional.

Kekecewaan ini diperparah oleh sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana kebijakan dan keputusan strategis sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah

¹³⁴ Gurr. *op. cit.* hlm. 13-15

pusat tanpa melibatkan aspirasi daerah secara memadai. Perasaan termarginalkan ini semakin kuat ketika pemerintah pusat dianggap gagal mengakomodasi tuntutan otonomi daerah dan pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, pembentukan PRRI/Permesta bukan semata-mata persoalan pemberontakan militer atau separatisme, melainkan ekspresi dari akumulasi ketidakpuasan struktural terhadap ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok di daerah. Dalam kerangka teori Ted Robert Gurr, gerakan ini merupakan manifestasi nyata dari frustrasi kolektif akibat deprivasi-relatif yang dialami oleh masyarakat dan elite lokal di luar pusat kekuasaan.